

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Amir Husni dan Muh. Prima Putra, *Pengendalian Mutu Hasil Perikanan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2014.
- Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan, *Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Angka 2019*, Pesisir Selatan, 2019.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan, *Kecamatan Sutera dalam Angka 2018*, Pesisir Selatan, 2018.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996.
- Galang Taufani Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)* Raja Grafindo, Jakarta, 2018.
- Josep Riwo Kaho, *Analisa Hubungan Pusat dan Daerah di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1982.
- Juniarso, *Hukum melaksanakan Negara*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1998.
- Ni'matul Huda, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, FH UII Press, Jakarta, 2007.
- Prayudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Yurisprudensi*, Ghalia Indonesia Jakarta, 1994.
- Saiful Anwar, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press, Jakarta, 2004.
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Malang, Nusantara, 1998.

SP. Siagian, *Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Pemerintahan*, UI Press, Jakarta, 1994.

Philipus M.Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.

WJS. Poerwadarmita, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.

Yudhi Setiawan, Boedi Djatmiko Hadiatmodjo, Imam Ropii, *Hukum Administrasi Pemerintahan Teori dan praktik*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2017.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

B. Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai tambah Produk Hasil Perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PERMEN-KP/2016 tentang Skala Usaha Pengolahan Ikan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2018 tentang Usaha Pengolahan Perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan.

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 32 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perikanan.

Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pangan.

